Journal of Applied Islamic Economics and Finance
Vol. 2, No. 1, October 2021, pp. 164 – 177, DOI 10.35313/jaief.v2i1.2875
©Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

The effect of sharia financial inclusion on human development index in Indonesia

Salma Nurul Zahara
Program Studi D4 Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Bandung
E-mail: salma.nurul.ksy17@polban.ac.id

Ruhadi
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung
E-mail: ruhadi@polban.ac.id

Setiawan
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung
E-mail: setiawan@polban.ac.id

Abstract: *Financial inclusion has an important role on the Human Development Index (HDI). This study aims to determine the value of Sharia Financial Inclusion from the value of each that dimension buldier and that effect on the HDI. The calculation uses the Index of Financial Inclusion method (Sarma and Pais, 2012) and panel data regression analysis to find that effect on HDI where the independent variable are the accessibility, availability and usage dimension and the dependent variable is Human Development Index (HDI). The period that used in this study is 2015-2019. The data used is secondary data from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Badan Pusat Statistik (BPS). The result of this study show that each of dimensions buldier of Financial Inclusion have a low value. Simultaneously the variable accessibility dimension, availability dimension and usage dimension have an effect on Human Development Index. Meanwhile partially, the accessibility dimension has not an effect on HDI, availability dimension has a negative effect on HDI and usage dimension has a positive effect on HDI.*

Keywords: *HDI, IFI, dimensions of financial inclusion*

1. Pendahuluan

Terjadinya krisis ekonomi tahun 2008 sangat berdampak pada perekonomian di seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang paling terdampak akibat adanya krisis ekonomi ini adalah masyarakat yang tergolong pada kelompok masyarakat *unbanked* yaitu kelompok masyarakat dimana akses terhadap layanan perbankan tidak dimiliki oleh kelompok tersebut. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara dimana masyarakat yang memiliki kendala dalam mengakses suatu lembaga keuangan formalnya masih tinggi. Menurut survey yang dilakukan oleh Bank Dunia (2010) dan Bank Indonesia (2011), di Indonesia kurang dari 50 persen masyarakat yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Indonesia telah memasukkan isu keuangan inklusif dalam prioritas pemerintahan sejak tahun 2012 dengan dibuat Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016.

Koordinasi pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dengan sektor perbankan sangat perlu dilakukan karena penggerak utama kegiatan keuangan inklusif berasal dari sektor perbankan. Perbankan syariah sendiri sebagai salah satu bagian sektor perbankan nasional, memiliki potensi besar dalam berkontribusi mewujudkan keuangan inklusif nasional mengingat sistem perbankan yang dianut oleh Indonesia adalah *dual banking system* dimana bank syariah dan bank konvensional dibiarkan untuk tumbuh secara bersamaan. Potensi besar bagi perbankan syariah juga dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama islam serta prinsip kerjasama dan bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang kedepannya akan berpengaruh terhadap tingkat pembangunan manusia.

Inklusi keuangan telah diidentifikasikan sebagai pendorong untuk tujuh dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan, artinya inklusi keuangan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan membuat pemerataan pembangunan manusia. Inklusi keuangan dianggap Bank Dunia sebagai pendorong utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran bersama. Peningkatan akses keuangan dapat meningkatkan investasi dan memperlancar konsumsi masyarakat termasuk dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu inklusi keuangan sangat berdampak terhadap pembangunan manusia. (World Bank, 2015)

Pembangunan manusia menurut UNDP merupakan proses perluasan pilihan dimana tujuan utamanya adalah menciptakan kesempatan berumur panjang, sehat dan menjalankan hidup produktif untuk mencapai kesejahteraan. Pengukuran pembangunan manusia ini dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didasarkan pada tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Keberhasilan pembangunan dapat ditunjukkan salah satunya dengan adanya akses terhadap layanan jasa keuangan formal. (Badan Pusat Statistik, 2019).

Akses terhadap layanan keuangan yang dimiliki oleh masyarakat akan menciptakan masyarakat yang dapat mengelola keuangannya dengan baik sehingga masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang yang disimpannya di perbankan syariah akan dikelola dan disalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan sehingga akan tercipta suatu kegiatan usaha yang produktif. Masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat mengakses layanan kesehatan serta pendidikan sehingga masyarakat tersebut akan memiliki standar hidup layak yang baik. Selain itu masyarakat akan mampu menunaikan zakat, infaq dan sedekahnya dengan baik sehingga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan.

Penelitian Sarma dan Pais (2012) menunjukkan terdapat pengaruh yang positif antara inklusi keuangan dengan IPM. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Umar (2017) menunjukkan nilai inklusi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah dan terdapat pengaruh signifikan antara inklusi keuangan syariah dengan IPM. Penelitian oleh Siswa dan Agustin (2020) menghasilkan bahwa dimensi aksesibilitas dan dimensi penggunaan berpengaruh positif terhadap IPM sedangkan dimensi ketersediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Penelitian Irsyaddinas (2019) mengatakan bahwa dimensi aksesibilitas yang diwakili oleh DPK berpengaruh negatif terhadap IPM, dimensi availabilitas yang diwakili oleh nasabah dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) berpengaruh positif terhadap IPM dan dimensi penggunaan yang diwakili oleh kredit berpengaruh positif terhadap IPM. Penelitian Sarma dan Pais (2012) serta Umar (2017) sama-sama menggunakan nilai indeks inklusi secara keseluruhan namun Sarma dan Pais (2012) memakai data perbankan konvensional sedangkan Umar(2017) memakai data perbankan syariah. Penelitian Siswa dan Agustin (2020) serta Irsyaddinas (2019) menggunakan nilai dari masing-masing dimensi penyusun inklusi keuangan dan sama-sama memakai data perbankan konvensional.

Akibat pentingnya sektor perbankan syariah dalam kontribusinya terhadap tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia serta pentingnya inklusi keuangan terhadap tingkat pembangunan manusia, maka penelitian ini akan mencoba mengukur tingkat inklusi keuangan syariah berdasarkan dimensi aksesibilitas, availabilitas dan penggunaan serta melihat pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Penelitian ini akan menjadi penelitian terbaru dan berbeda karena memakai nilai dari masing-masing dimensi penyusun inklusi keuangan dengan menggunakan data perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur tingkat dimensi penyusun inklusi keuangan syariah yaitu tingkat dimensi aksesibilitas, dimensi availabilitas serta dimensi penggunaan dan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 33 Provinsi Indonesia periode 2015-2019 baik secara parsial maupun simultan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan Manusia didefinisikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai proses perluasan pilihan manusia. Pilihan manusia pada prisnipnya selalu berubah-ubah setiap saat dengan jumlah yang sangat banyak. Tetapi ada tiga pilihan mendasar pada seluruh level pembangunan yaitu hidup sehat dan panjang umur, mendapatkan pendidikan dan hidup layak dengan memiliki akses kepada sumber kebutuhan. Amartya Sen dalam (Badan Pusat Statistik, 2019) mengartikan pembangunan manusia sebagai diperluasnya kebebasan yang nyata untuk dapat dinikmati manusia dimana kebebasannya ini tergantung pada faktor ekonomi dan sosial.

Pembangunan manusia diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diciptakan UNDP. Menurut UNDP, pencapaian pembangunan manusia diukur dalam IPM dengan didasarkan pada komponen kualitas hidup. IPM dibentuk melalui dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi standar hidup layak. Kesehatan dicerminkan dengan umur panjang dan hidup sehat yang merepresentasikan tingkat harapan hidup. Pendidikan dicerminkan dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Standar hidup layak dihitung dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.

2.2 Inklusi Keuangan

Bank Indonesia dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif mendefinisikan inklusi keuangan sebagai hak semua orang untuk mempunyai akses terhadap lembaga keuangan formal secara aman, nyaman, tepat waktu dan biaya terjangkau dengan penghormatan yang penuh terhadap martabat manusia. Sarma (2012) mendefinisikan proses terjaminnya kemudahan, ketersediaan dan kemanfaatan dari lembaga keuangan formal untuk semua masyarakat sebagai inklusi keuangan. Berdasarkan definisi diatas, inklusi keuangan adalah tersedianya kemudahan akses oleh seluruh lapisan masyarakat kepada lembaga keuangan formal untuk meningkatkan perekonomian. Sedangkan inklusi keungan syariah adalah ketersediaan dan kemudahan akses bagi seluruh golongan masyarakat untuk dapat menjangkau layanan lembaga jasa keuangan sesuai aturan dan hukum syariah.

2.3 Indikator Inklusi Keuangan

Pengukuran Indeks Inklusi Keuangan dapat diukur dengan *Index of Financial Inclusion* (IFI). Indeks ini dibangun sebagai indeks multidimensi yang menangkap informasi berbagai aspek inklusifitas seperti penetrasi perbankan, layanan perbankan yang tersedia dan penggunaan sistem perbankan. Indikator penyusun *Index Financial Inclusion* (IFI) yaitu: (Sarma & Pais, Financial Inclusion and Development : A Cross Country Analysis, 2012)

a. Dimensi Aksesibilitas

Dimensi ini adalah dimensi untuk mengukur penetrasi perbankan pada masyarakat. Ukuran untuk penetrasi perbankan ini dicerminkan oleh besar kecilnya populasi orang yang mempunyai rekening perbankan. Menurut Sarma dan Pais (2012) setiap rekening bank yang dimiliki oleh masyarakat menandakan jangkauan perbankan terhadap masyarakat. Jika tidak ada data mengenai jumlah populasi masyarakat yang memiliki rekening perbankan maka digunakan indikator jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1.000. DPK yang terkumpul ini akan disalurkan kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan usaha produktif dan dapat mendorong kualitas sumber daya manusia. Hipotesis berdasarkan hal diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_1: Diduga terdapat pengaruh dari Dimensi Aksesibilitas (D1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

b. Dimensi Availibilitas

Dimensi ini merupakan pengukur kemampuan jasa keuangan dalam pemberian akses dan pelayanan yang mudah kepada masyarakat. Dimensi ini mengukur banyaknya perbankan dalam menawarkan akses pelayanan terhadap masyarakat. Indikatornya yaitu kantor cabang perbankan. Perhitungan dimensi ini adalah jumlah kantor layanan perbankan dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100.000. Menurut Ummah, Nuryanto dan Anggraeni (2014) hal penting dalam keuangan yang inklusif adalah keberadaan jasa keuangan. Terjangkaunya kantor layanan perbankan oleh masyarakat menunjukkan penyebaran jasa perbankan yang luas. Luasnya penyebaran jasa perbankan ditandai dengan semakin banyaknya jumlah kantor perbankan yang tersedia. Adanya penyebaran kantor cabang yang semakin luas memberikan layanan jasa perbankan kepada masyarakat yang semakin tinggi artinya masyarakat semakin mudah mengakses lembaga jasa keuangan. Hipotesis berdasarkan hal diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_2: Diduga terdapat pengaruh dari Dimensi Availabilitas (D2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

c. Dimensi Penggunaan

Dimensi ini merupakan pengukuran fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat. Perhitungan dimensi ini yaitu total pembiayaan perbankan syariah dibanding dengan jumlah PDRB suatu negara dikali 1.000. Menurut penelitian Siswa dan Agustin (2020), semakin banyak produk kredit yang dimanfaatkan oleh masyarakat maka kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakat ssemakin meningkat. Masyarakat yang terakses terhadap perbankan syariah dan mendapatkan pembiayaan maka dapat membuat suatu usaha produktif untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kapasitas dan kualitas dirinya meningkat, dengan begitu masyarakat juga akan dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan untuk kehidupannya. Hipotesis berdasarkan hal diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_3: Diduga terdapat pengaruh dari Dimensi Penggunaan (D3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian dengan kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dimana fenomena, situasi dan kondisi penelitian digambarkan dan dijelaskan secara ringkas sesuai kejadian

sebenarnya yang dapat diungkapkan melalui bahan dokumenter seperti wawancara, foto serta observasi. (Bungin, 2005)

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berbentuk data panel dimana datanya merupakan data gabungan dari *cross section* yang berupa data 33 Provinsi di Indonesia dan *time series* yang berupa data dari periode 2015-2019.

Data sekunder yang digunakan pada penelitian berbasis tahunan bersumber dari Laporan Statistika Perbankan Syariah OJK untuk data Perbankan Syariah, dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data penduduk, data Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan data Pendapatan Regional Domestik Produk (PDRB).

Populasi dan Sample

Menurut Hadari Nawawi (1983) sumber data dengan karakteristik tertentu yang berasal dari keseluruhan objek penelitian yang sedang dilakukan merupakan definisi populasi. Populasi yang digunakan adalah provinsi yang ada di Indonesia.

Menurut Sugiyono (2011) sampel yaitu bagian dari populasi penelitian dengan karakteristik dan jumlah tertentu. Penelitian ini menggunakan sampel 33 provinsi di Indonesia. Pengambilan sampelnya dengan teknik *purposive sampling* dimana kriteria sampel yang digunakan yaitu Provinsi di Indonesia yang memiliki perbankan syariah baik itu BUS, UUS ataupun BPRS, laporan keuangan perbankan syariahnya dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terdapat dalam Laporan Statistika Perbankan Syariah selama periode penelitian.

Metode Analisis Data

Penelitian ini mengacu pada perhitungan *Index of Financial Inclusion (IFI)* oleh Sarma dan Pais (2012) yang menggunakan dimensi aksesibilitas, availabilitas dan penggunaan. Analisis regresi data panel dengan memakai aplikasi *software Eviews* versi 10 dipakai pada penelitian ini untuk melakukan analisis datanya.

a. Regresi Data Panel

Regresi dimana datanya berupa data panel disebut regresi data panel. Terdapat tiga estimasi model regresi data panel menurut Widarjono (2007) yaitu model *common effect, fixed effect* dan *random effect.*

b. Pemilihan Model Regresi

Terdapat tiga pengujian untuk pemilihan teknik estimasi model regresi data panel menurut (Widarjono, 2007) yaitu :

- **Uji *Chow***

  Uji *Chow* merupakan uji pengestimasian data panel dengan cara pemilihan model mana antara *fixed effect* dengan *common effect* yang dapat digunakan paling tepat. Apabila batas kritis > nilai probabilitas F, maka H_0 ditolak atau memilih *fixed effect*. Begitupun sebaliknya.

- **Uji *Hausman***

  Uji *Hausman* merupakan uji pengestimasian data panel dengan cara pemilihan model mana antara *fixed effect* dengan *random effect* yang dapat digunakan paling tepat. Apabila taraf signifikansi > nilai prob. *chi squares*, maka H_0 ditolak atau memilih *fixed effect.* Begitupun sebaliknya.

- **Uji *Lagrange Multiplier (LM)***

  Uji *Lagrange Multiplier (LM)* merupakan pengujian dalam pemilihan model terbaik antara model *common effect* dengan *random effect.* Apabila batas kritis > nilai p *value*, maka H_0 ditolak atau memilih *random effesct.* Begitupun sebaliknya.

c. Uji Asumsi Klasik

Melihat apakah syarat BLUE *(Best Linier Unbias Estimator)* terpenuhi pada model yang terbentuk merupakan tujuan uji asumsi klasik. Jika model *Common Effect* atau *Fixed Effect* terpilih, maka diperlukan uji asumsi klasik dan hanya melakukan uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas saja. Sedangkan apabila model *Random Effect* terpilih, maka uji asumsi klasik tidak diperlukan. (Sakti, 2018)

- **Uji Heteroskedastisitas**

  Pelaksanaan pengujian heteroskedastisitas ini untuk melihat apakah varian yang konstan dimiliki oleh residual dari model yang terbentuk atau tidak. Metode *white* adalah alternatif metode yang dilakukan untuk uji heteroskedastisitas pada penelitian ini. Apabila taraf signifikansi < probabilitas *chi square*, maka H_0 diterima atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Begitupun sebaliknya. (Widarjono, 2007)

- **Uji Multikolinieritas**

  Menurut Widarjono (2007) ketika variabel bebas yang digunakan dalam model regresi lebih dari satu maka perlu dilakukannya uji multikolinieritas. Multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antar variabel bebas. Metode korelasi berpasangan digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas pada penelitian ini. Apabila nilai korelasi setiap variabel bebas < 0,85, H_0 diterima atau tidak terdapat multikolinieritas. Begitupun sebaliknya.

d. Koefisien Determinasi

Cerminan besarnya variasi dari variabel bebas yang menjelaskan variabel terikat merupakan definisi koefisien determinasi. (Nachrowi dan Hardius, 2006). Menurut Widarjono (2007), jika nilainya mendekati satu, model dikatakan baik. Begitupun sebaliknya, jika nilainya mendekati nol maka model tidak cukup baik.

e. Uji Hipotesis

- **Uji F**

  Uji *goodness of fit* atau uji F yaitu pengukuran yang dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan atau bersamaan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila taraf signifikansi > prob. F statistik, maka H_0 ditolak artinya secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Begitupun sebaliknya. (Gujarati, 2007)

- **Uji t**

  Uji t merupakan pengujian terhadap pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu atau parsial. Jika taraf signifikansi > nilai prob., maka H_0 ditolak artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Begitupun sebaliknya. (Gujarati, 2007)

4. Hasil dan Pembahasan

Perhitungan Dimensi Inklusi Keuangan Syariah

Nilai inklusi Keuangan Syariah pada penelitian ini diperoleh dari perhitungan Dimensi Aksesibilitas, Dimensi Availabilitas dan Dimensi Penggunaan. Berikut hasil perhitungan nilai rata-rata dimensi inklusi keuangan syariah :

Tabel. 1 Nilai Rata-Rata Dimensi

No.	Provinsi	D1	D2	D3
1	Jawa Barat	1.1585	0.68509	25.6950
2	Banten	0.8050	0.80015	20.7888
3	DKI Jakarta	14.1374	2.63565	72.9944
4	Yogyakarta	1.2677	1.69283	39.5762

Tabel. 1 Nilai Rata-Rata Dimensi (Lanjutan)

No.	Provinsi	D1	D2	D3
5	Jawa Tengah	0.5819	0.69181	19.4798
6	Jawa Timur	0.9599	1.01378	17.2051
7	Bengkulu	0.3752	0.85917	27.5547
8	Jambi	0.3787	0.70232	18.5938
9	Nanggroe Aceh Darussalam	3.3189	2.99665	100.0898
10	Sumatera Utara	0.9062	0.96286	20.3557
11	Sumatera Barat	0.6812	1.01767	25.7877
12	Riau	0.8013	0.94079	11.0491
13	Sumatera Selatan	0.8995	1.23934	19.7665
14	Bangka Belitung	0.6375	0.65133	16.2009
15	Kepulauan Riau	0.9151	1.31101	21.5205
16	Lampung	0.6014	1.29476	13.2413
17	Kalimantan Selatan	1.3003	1.62611	35.1101
18	Kalimantan Barat	0.6096	0.93487	32.0003
19	Kalimantan Timur	1.9018	2.74927	10.0806
20	Kalimantan Tengah	0.3074	0.51565	11.9687
21	Sulawesi Tengah	0.3291	0.64806	12.4187
22	Sulawesi Selatan	0.9997	1.65008	21.6843
23	Sulawesi Utara	0.1540	0.56885	6.0495
24	Gorontalo	0.1622	0.40943	11.2462
25	Sulawesi Barat	0.1312	0.32086	8.6090
26	Sulawesi Tenggara	0.3497	0.80939	11.8096
27	Nusa Tenggara Barat	0.8679	1.35831	52.6279
28	Nusa Tenggara Timur	0.0204	0.06818	2.8501
29	Bali	0.2262	0.48069	11.7984
30	Maluku Utara	0.3643	0.75458	13.3189
31	Maluku	0.2110	0.2791	5.1992
32	Papua	0.2413	0.32275	3.4265
33	Papua Barat	0.3315	0.38361	2.4407

Sumber : Data diolah penulis

a. Dimensi Aksesibilitas

Nilai dimensi aksesibilitas yang paling tinggi dari 33 provinsi di Indonesia dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta dimana nilai rata-ratanya 14.137. Artinya rata-rata DPK yang dimiliki provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 14.137.400.000 per 1000 penduduk atau sebesar Rp. 14.137.400 per penduduk. Kondisi tersebut dikarenakan ibukota Indonesia berada di provinsi DKI Jakarta sehingga otomatis menjadi pusat perekonomian negara Indonesia, oelh karena itu aktivitas perekonomian di provinsi DKI Jakarta juga menjadi sangat tinggi. Sedangkan untuk nilai dimensi aksesibilitas yang paling rendah dimiliki oleh provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dimana nilai rata-ratanya sebesar Rp. 20.400.000 per 1000 penduduk atau sebesar Rp. 20.400 per penduduk.

b. Dimensi availabilitas

Nilai dimensi availabilitas yang paling tinggi dari 33 provinsi di Indonesia dimiliki oleh provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana nilai rata-ratanya sebesar 2,9967 atau dibulatkan menjadi 3 artinya rata-rata jumlah kantor layanan perbankan syariah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sejumlah 3 unit untuk memberikan pelayana kepada 100.000 penduduk. Sedangkan untuk nilai dimensi availabilitas yang paling rendah dimiliki oleh provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dimana nilai rata-ratanya sebesar 0.00682 atau dibulatkan menjadi 1 artinya rata-rata kantor layanan perbankan syariah di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah sejumlah 1 unit untuk memberikan pelayanan kepada 100.000 penduduk. Hal tersebut

disebabkan mayoritas penduduk NTT adalah non-muslim sehingga perkembangan perbankan syariahnya cukup lambat dibanding dengan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan mayoritas penduduknya adalah muslim.

c. Dimensi Penggunaan

Nilai dimensi penggunaan yang paling tinggi dari 33 provinsi di Indonesia dimiliki oleh provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana nilai rata-rata pembiayaannya adalah sebesar Rp. 100.089.800.000. Sedangkan untuk nilai dimensi penggunaan yang paling rendah dimiliki oleh provinsi Papua Barat dimana nilai rata-rata pembiayaannya sebesar Rp. 2.440.700.000. Hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam beragama Islam dan diberlakukan hukum syariah sehingga pemakaian produk perbankan syariah lebih tinggi dari provinsi di Indonesia yang lainnya. Berbeda dengan provinsi Papua Barat yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim, maka pemakaian produk perbankan syariahnya masih sedikit.

Analisis Statistika Deskriptif

Tabel. 2 Hasil Analisis Statistika Deskriptif

Dimensi Aksesibilitas (D1)						
Statistik	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Average**
Mean	0.9483	0.9453	1.1059	1.2259	1.3705	1.1192
Median	0.4259	0.4542	0.4908	0.5715	0.6369	0.5159
Min	0.0118	0.0225	0.0210	0.0236	0.0233	0.0204
Max	7.2996	13.1107	15.6087	16.6374	18.0304	14.1374
Std. Deviasi	1.4280	2.2559	2.6954	2.8566	3.1041	2.4680
Dimensi Availabilitas (D2)						
Statistik	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Average**
Mean	1.2809	0.9431	0.9267	0.9478	0.9584	1.0114
Median	0.8493	0.7842	0.7853	0.7682	0.7766	0.7927
Min	0.0406	0.0769	0.0757	0.0745	0.0733	0.0682
Max	5.2762	3.2966	3.3337	3.4461	3.7420	3.8189
Std. Deviasi	1.3887	0.7178	0.6984	0.7149	0.7538	0.8547
Dimensi Penggunaan (D3)						
Statistik	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Average**
Mean	16.5745	20.4035	22.0169	24.3684	26.1121	21.8951
Median	15.0342	16.1912	17.3243	18.1160	19.0428	17.1417
Min	2.8273	2.7782	2.5030	2.1666	1.9011	2.4352
Max	61.1825	114.4084	117.0731	114.5705	127.4440	106.9357
Std. Deviasi	11.3363	20.9181	22.1636	24.4854	26.9483	21.1703
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						
Statistik	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Average**
Mean	68.5718	69.1585	69.7491	70.3812	71.0370	69.7795
Median	68.8900	69.5500	69.9900	70.6500	71.2600	70.0680
Min	57.2500	58.0500	59.0900	60.0600	60.8400	59.0580
Max	78.9900	79.6000	80.0600	80.4700	80.7600	79.9760
Std. Deviasi	4.2323	4.2148	4.1369	4.0560	3.9738	4.1227

Sumber : Data diolah penulis

a. Dimensi Aksesibilitas (D1)

Nilai rata-rata Dimensi Aksesibilitas pada tahun 2015-2019 adalah sebesar 1.1192, artinya rata-rata jumlah DPK perbankan syariah di Indonesia pada periode 2015-2019 tersebut adalah sebesar Rp. 1.119.200.000 per 1000 penduduk atau sekitar Rp. 1.119.200 per penduduk.

b. Dimensi Availabilitas (D2)

Nilai rata-rata Dimensi Availabilitas pada tahun 2015-2019 adalah sebesar 1.0114, artinya rata-rata kantor layanan perbankan syariah untuk memberikan pelayanan kepada seratus ribu

penduduk di Indonesia selama periode tersebut adalah sebesar 1 unit.

c. Dimensi Penggunaan (D3)

Nilai rata-rata Dimensi Penggunaan pada tahun 2015-2019 adalah sebesar 21.8951, artinya rata-rata jumlah penggunaan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 21.895.100.000.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2015-2019 adalah sebesar 69.7795.

Uji *Chow*

Tabel. 3 Hasil Uji *Chow*

Effects Test	*Statistic*	*d.f*	*prob.*
Cross-section F	77.8211	-32,129	0.0000
Cross-section Chi-square	496.788684	32	0.0000

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan hasil nilai prob. *Cross-section F* sebesar 0.0000 kurang dari taraf signifikansi sebesar 0.05 sehingga menolak H_0 dan menerima H_1, artinya dalam penelitian ini lebih baik memakai model *Fixed Effect* dibanding model *Common Effect*. Karena pada uji pertama ini model *Fixed Effect* yang terpilih, maka untuk pengujian berikutnya perlu melakukan uji *Hausman*.

Uji *Hausman*

Tabel. 4 Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	*Chi-Sq. Statistic*	*Chi-Sq. d.f.*	*Prob.*
Cross-section random	13.693576	3	0.0034

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan hasil nilai prob. *Chi Squares* sebesar 0.0034 kurang dari taraf signifikansi sebesar 0.05 sehingga menolak H_0 dan menerima H_1, artinya lebih baik memakai model *Fixed Effect* dibanding model *Random Effect*. Karena pada uji pertama dan uji kedua hasilnya sama yaitu terpilihnya model *Fixed Effect*, maka model *Fixed Effect* yang lebih tepat digunakan, sehingga tidak perlu melaksanakan uji *Lagrange Multiplier*.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan hanya pengujian heteroskedastisitas dan multikolinieritas karena model yang terpilih adalah *fixed Effect*. (Gujarati, 2007)

a. Uji Heteroskedastisitas

Tabel. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistsic	1.486682	*Prob. F(9,155)*	0.1573
*Obs*R-squared*	13.11154	*Prob. Chi-square(9)*	0.1576
Scaled explained	16.87506	*Prob. Chi-square(9)*	0.0507

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai Prob. *Chi-square* dari *Obs*R-squared*

sebesar 0.1576 lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0.05 sehingga menerima H_0 dan menolak H_1, artinya pada model penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel. 6 Hasil Uji Multikolinieritas

Correlation			
	Dimensi Aksesibilitas (D1)	Dimensi Availabilitas (D2)	Dimensi Penggunaan (D3)
Dimensi Aksesibilitas (D1)	1.000000	0.543249	0.596887
Dimensi Availabilitas (D2)	0.543249	1.000000	0.592078
Dimensi Penggunaan (D3)	0.596887	0.592078	1.000000

Sumber : Data diolah penulis

Tabel diatas menunjukkan nilai korelasi setiap variabel bebas kurang dari 0,85 sehingga menerima H_0 dan menolak H_1. Artinya pada model penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas atau bebas dari multikolinieritas.

Berdasarkan kedua uji asumsi klasik yang sudah dilaksanakan, model penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas dan multikolinieritas, maka model pada penelitian ini memenuhi semua persyaratan yang ada pada uji asumsi klasik untuk model *Fixed Effect*.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel. 7 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel Dependen	Variabel Independen	*Coefficient*
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	C	69.2575
	Dimensi Aksesibilitas (D1)	0.165388
	Dimensi Availabilitas (D2)	-0.496865
	Dimensi Penggunaan (D3)	0.038338
Koefisien Determinasi (R^2)	0.964759	
Prob (F-statistic)	0.000000	
S.E. of regressions	0.881761	
S.D. dependent var	4.165808	

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, model persamaan regresi data panel diperoleh sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 69.2575 + 0.165388X_1 - 0.496865\ X_2 + 0.038338X_3 + \varepsilon_{it}}$$

Nilai konstanta sebesar 69.2575 menunjukkan bahwa apabila variabel independen yang diteliti berjumlah nol maka akan terjadi peningkatan pada IPM sebesar 69.2575. Koefisien beta X_1 (Dimensi Aksesibilitas) adalah sebesar 0.165388, artinya X_1 dapat menjelaskan Y (IPM) sebesar 16.5388 satuan. Koefisien beta X_2 (Dimensi Availabilitas) adalah sebesar -0.496865, artinya X_2 dapat menjelaskan Y (IPM) sebesar 49.6865 satuan. Koefisien beta X_3 (Dimensi Penggunaan) adalah sebesar 0.038338, artinya X_2 dapat menjelaskan Y (IPM) sebesar 3.8338 satuan.

Nilai *S.E. of regression* yang menunjukkan nilai *standar error* adalah sebesar 0.881761 lebih kecil daripada nilai *S.D. dependent var* yang menunjukkan nilai standar deviasi yaitu sebesar 4.165808, artinya model regresi data panel penelitian ini valid sebagai model prediktor.

a. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pada Tabel.7 diatas, didapat nilai koefisien determinasi sebesar 0.964759, artinya variabel Y (dependen) dapat diterangkan oleh variabel X (independen) sebesar 96.4759%, sisanya diterangkan oleh variabel diluar model yang diteliti.

b. Uji F

Berdasarkan hasil pada Tabel.7 diatas nilai probabilitas *F-statistic* pada peneltian ini sebesar 0.000000 lebih kecil daripada taraf signifikansi sebesar 0.05 sehingga menolak H_0 dan menerima H_1. Artinya variabel X (bebas) yang meliputi Dimensi Aksesibilitas, Dimensi Availabilitas dan Dimensi Penggunaan secara simultan (bersamaan) berpengaruh terhadap variabel Y (terikat) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

c. Uji t

Tabel. 8 Hasil Uji t

Variabel Independen	*Coefficient*	*Std. error*	*t-Statistic*	*Prob.*
	69.2575	0.205137	337.6166	0.0000
Dimensi Aksesibilitas (D1)	0.165388	0.10853	1.523895	0.1300
Dimensi Availabilitas (D2)	-0.496865	0.137214	-3.621087	0.0004
Dimensi Penggunaan (D3)	0.038338	0.00875	4.381563	0.0000

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, dimensi aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap IPM, dimensi availabilitas berpengaruh negatif terhadap IPM, dan dimensi penggunaan berpengaruh positif terhadap IPM.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Dimensi Aksesibilitas (D1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil diatas, nilai probabilitas *t-statistic* variabel Dimensi Aksesibilitas adalah sebesar 0.1300 lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0.05 sehingga menerima H_0 dan menolak H_1. Artinya, variabel Dimensi Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan begitu hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari Dimensi Aksesibilitas (D1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) **ditolak.**

Hal tersebut dikarenakan jumlah kepemilikan rekening oleh masyarakat saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun masyarakat telah memiliki akses terhadap perbankan syariah, namun apabila produk dan jasa dari perbankan syariah tidak dioptimalkan dengan baik maka masyarakat tidak akan mendapatkan manfaat dari perbankan syariah sehingga tidak dapat meningkatkan standar kualitas hidupnya. Literasi mengenai pengetahuan produk dan jasa perbankan syariah serta penggunaan yang maksimal terhadapnya perlu ditingkatkan dan dilakukan oleh masyarakat sehingga hal tersebut diharapkan akan berdampak terhadap pembangunan manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Mankiw (2014) meningkatkan nilai tabungan atau investasi dapat mendorong perekonomian sehingga dapat meningkatkan kualitas standar hidup masyarakat. Sarma dan Pais (2012) menyebutkan bahwa DPK yang terhimpun akan disalurkan kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan perekonomian yang produktif dan dapat mendorong kualitas dari sumber daya manusia. Namun memiliki rekening di bank saja tidak cukup sehingga perlu adanya penggunaan jasa-jasa perbankan lainnya. Sebagian besar daerah masih memiliki nilai dimensi aksesibilitas yang rendah dikarenakan meskipun masyarakat telah memiliki akses terhadap jasa

keuangan namun jasa-jasa perbankan tidak digunakan dengan baik oleh masyarakat sehingga manfaat perbankan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat tidak dapat dirasakan secara optimal.

Pengaruh Dimensi Availabilitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil diatas, *t-statistic* bernilai negatif dan probabilitas *t-statistic* variabel Dimensi Availabilitas adalah sebesar 0.0004 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0.05 sehingga menerima H_1 dan menolak H_0, berarti variabel Dimensi Availabilitas berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berkorelasi negatif. Oleh sebab itu hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari Dimensi Availabilitas (D2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat **diterima.**

Hal tersebut dikarenakan kurangnya peningkatan teknologi serta tersedianya kantor layanan perbankan syariah yang tidak dioptimalkan dengan baik oleh masyarakat menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Perbankan syariah dalam menjangkau masyarakat sebaiknya tidak harus melalui pembentukan kantor cabang baru saja, namun diperlukan peningkatan teknologi sehingga masyarakat dapat mengakses perbankan syariah dengan lebih mudah dan cepat. Penggunaan kantor cabang yang sudah ada perlu dimaksimalkan dengan baik serta dengan peningkatakan teknologi perbankan syariah dapat menekan biaya operasional sehingga laba bersih yang dibagikan kepada masyarakat menjadi lebih besar. Oleh karenanya diharapkan kantor cabang serta fasilitas dan layanan dari perbankan syariah dioptimalkan sebaik-bainya sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan nantinya akan menyebabkan dampak yang positif bagi pembangunan manusia.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Siswa dan Agustin (2020) dimana dimensi availabilitas memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berkorelasi negatif. Menurunnya variabel dimensi availabilitas akan meningkatkan variabel IPM. Hal ini terjadi dikarenakan ketersediaan layanan perbankan tidak selalu dilihat berdasarkan jumlah kantor cabang saja. Diperlukan perluasan layanan perbankan yang dapat menjangkau semua kalangan dengan mudah dan cepat salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Kehadiran teknologi informasi harus dimanfaatkan oleh perbankan karena adanya teknologi dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar perbankan. (Salam, 2018)

Pengaruh Dimensi Penggunaan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil diatas, *t-statistic* bernilai positif dan nilai probabilitas *t-statistic* variabel Dimensi Penggunaan adalah sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0.05 sehingga menolak H_0 dan menerima H_1, berarti variabel Dimensi Penggunaan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berkorelasi positif. Oleh ssebab itu hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari Dimensi Penggunaan (D3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat **diterima.**

Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan perbankan syariah tersebut dapat meningkatkan dan mendorong perputaran perekonomian dan pemberdayaan umat dengan menyediakan dana bagi peningkatan usaha masyarakat yang produktif sehingga kualitas dan taraf hidup masyarakat dapat meningkat.

Pembiayaan dari perbankan syariah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan umat juga akan semakin terdorong oleh adanya pembiayaan perbankan syariah melalui kegiatan usaha yang produktif sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Artinya, ketika perbankan syariah menyalurkan pembiayaan maka akan berpengaruh pada meningkatnya modal usaha produktif sehingga tingkat pengangguran akan berkurang.

Berkurangnya tingkat pengangguran akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga akan berdampak baik terhadap pembangunan manusia. (Amalia, Fauziah, & Wahyuningsih, 2019)

5. Penutup

Berdasarkan hasil perhitungan dimensi penyusun inklusi keuangan syariah yang sudah dilaksanakan pada penelitian ini, rata-rata nilai dari masing-masing dimensi penyusun inklusi keuangan syariah di Indonesia ini terbilang masih rendah. Artinya, akses terhadap layanan jasa keuangan syariah belum dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara simultan Dimensi Aksesibilitas, Availabilitas dan Penggunaan berpengaruh terhadap IPM di 33 Provinsi Indonesia selama periode 2015-2019. Secara Parsial, Dimensi Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap IPM di 33 Provinsi Indonesia selama periode 2015-2019. Artinya, kenaikan atau penurunan DPK perbankan syariah tidak akan berpengaruh terhadap IPM. Dimensi Availabilitas berpengaruh negatif terhadap Indeks IPM di 33 Provinsi Indonesia selama periode 2015-2019. Artinya, apabila nilai dimensi availabilitas meningkats maka akan terjadi penurunan pada IPM begitupun sebaliknya. Dimensi Penggunaan berpengaruh positif terhadap IPM di 33 Provinsi Indonesia selama periode 2015-2019. Artinya, kenaikan jumlah pembiayaan yang digunakan oleh masyarakat akan meningkatkan IPM begitupun sebaliknya.

Sampel pada penelitian ini memiliki keterbatasan dimana hanya menggunakan 33 provinsi sebagai objek penelitian dan periode penelitian hanya terbatas pada lima tahun. Selain itu, untuk mengukur inklusi keuangan syariah pada penelitian ini hanya terbatas pada sektor perbankan syariah saja mengingat adanya keterbatasan data yang diperoleh.

Bagi Perbankan syariah sebaiknya lebih mengoptimalkan DPK yang ada salah satunya dengan disalurkan kepada pembiayaan sehingga DPK yang dimiliki oleh masyarakat dapat berdampak pada pembangunan manusia. Selain itu, perbankan syariah dalam memperluas jaringannya tidak perlu harus selalu dengan cara membangun kantor cabang yang baru. Sebaiknya perbankan syariah mulai memanfaatkan teknologi seperti membuat *digital banking* sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses perbankan syariah.

Bagi penelitian kedepannya disarankan untuk memakai data sektor industri keuangan syariah yang lebih luas. Selain itu, disarankan agar memperhitungkan penggunaan teknologi seperti penggunaan ATM, *mobile banking* dan *internet banking* pada Dimensi Availabilitas agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bank Indonesia. (2014). *Peran BI dalam SSK.* Retrieved December 2, 2020, from Bank Indonesia: https://www.bi.go.id/id/ssk/Peran-BI-SSK

Bank Indonesia, D. P. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif.* Jakarta: Departemen Pengambangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia.

Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana.

Gujarati, D. N. (2007). *Dasar-dasar Ekonometrika.*

Irsyaddinas, A. (2019). *Analisis Peran Inklusi Keuangan Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia tahun 2012-2017*. 5-6.

Iskandar, A., & Possumah, B. T. (2018). *Inklusifitas Keuangan Syariah dan Kemiskinan di Indonesia*. Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam, 105-119.

Julius, O., & Oladiipo, E. (2020). *Financial Inclusion and Human Development in Sub-Saharan Africa.* IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF).

Mankiw, G. N. (2014). *Pengantar Ekonomi Makro.* Jakarta: Salemba Empat.

Nachrowi, N., & Hardius, U. (2006). *Ekonometrika Pendekatan Populer dan Praktis untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Nawawi, H. (1983). *Metode Penelitian Deskriptif.* Yogyakarta.

Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services.* Scientific Publishing Centre.

Puspitasari, S., Mahri, A. J., & Utami, S. A. (2019). *Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018.* Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 4, 15-31.

Sakti, I. (2018). *Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews.* Jakarta: Universitas Esa Unggul.

Salam, A. (2018). *Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan.* Al-Amwal Journal, 78-79.

Sanjaya, I. M., & Nursechafia. (2016). *Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif : Analisis Antar Provinsi di Indonesia.* Scholar.

Sarma, M., & Pais, J. (2008). *Index of Financial Inclusion*. Working Paper, 7-12.

Sarma, M., & Pais, J. (2012). *Financial Inclusion and Development : A Cross Country Analysis.* Journal Of Financial Economics, 23-24.

Siswa, I., & Agustin, G. (2020). *Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018.* Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 124-128.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Umar, A. I. (2017). *Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia.* Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 123-124.

Ummah, B. B., Nuryantono, N., & Anggraeni, L. (2014). *Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia.* Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 16-21.

Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.

World Bank. (2015). *World Bank.* Retrieved from www.worldbank.org